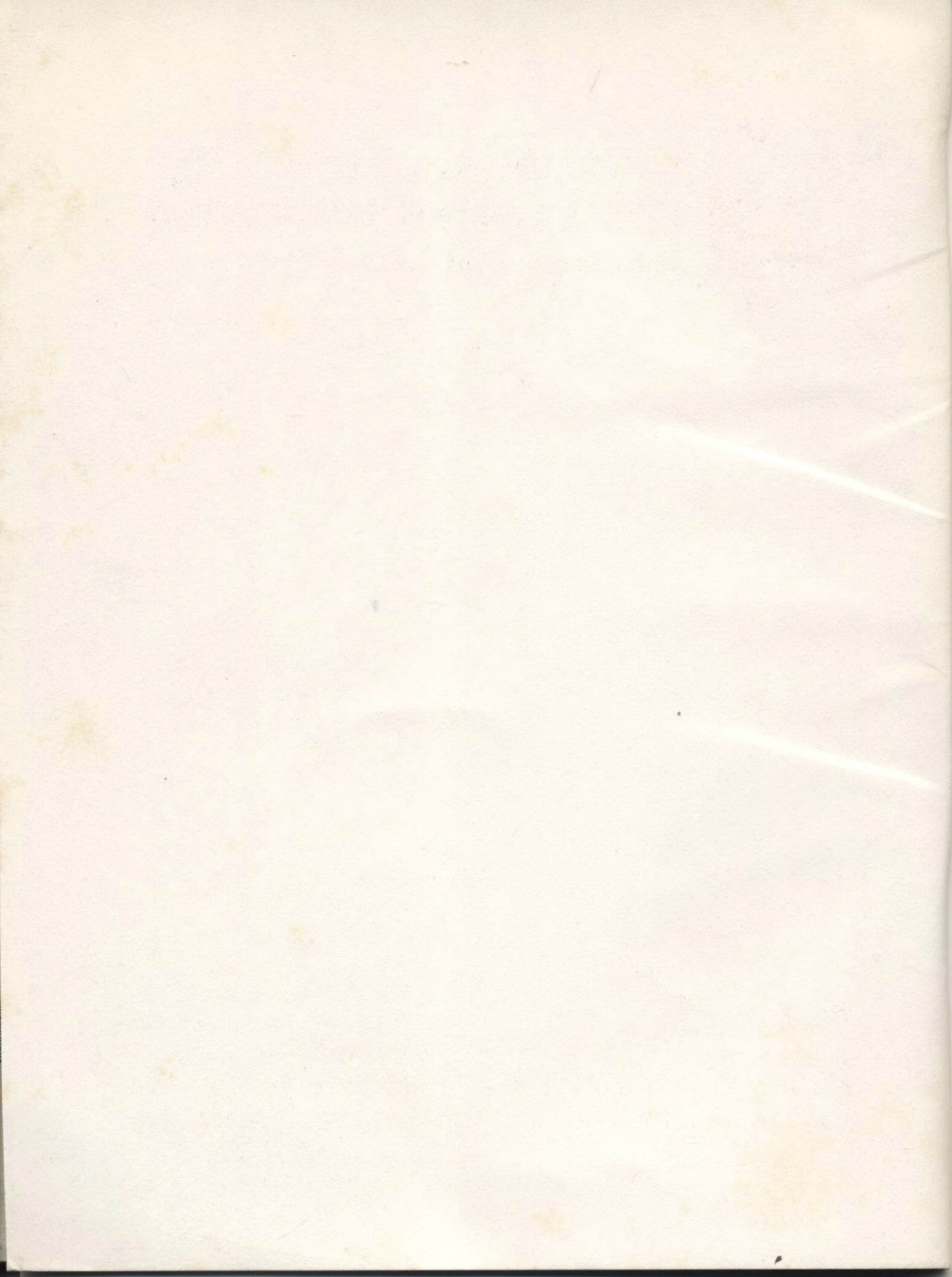




# KEBIJAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PELITA VI

DEPARTEMEN PERTANIAN  
BALAI INFORMASI PERTANIAN NTB  
1994 / 1995

63  
R





## **KEBIJAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PELITA VI**

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan bidang pertanian adalah terselenggaranya penyuluhan pertanian yang mampu mengembangkan sumberdaya manusia khususnya petani-pelayan dalam mengidentifikasi, menganalisa dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Beratnya tantangan masa depan sebagai konsekuensi adanya pergeseran-pergeseran pola fikir, sudah tentu menandakan penyempurnaan kebijaksanaan penyuluhan pertanian dari kebijaksanaan yang bertumpu pada menjadikan petani-pelayan yang mampu berproduksi kearah mewujudkan petani-pelayan yang maju, tangguh dan mandiri yang berjiwa agribisnis.

Untuk itu, Balai Informasi Pertanian NTB, melecehkan brosur Kebijakan Penyuluhan dalam Pelita VI.

Semoga brosur ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya semua masa penyuluh.

**DEPARTEMEN PERTANIAN  
BALAI INFORMASI PERTANIAN NTB  
Kotak Pos 1017, Telp. (0364) 31312 Mataram 83010**

BIP NTB

KEBUKSAAN  
PENYULUHAN PERTANIAN  
DALAM PELITA VI



DEPARTEMEN PERTANIAN  
BALAI INFORMASI PERTANIAN NTB  
Kotak Pos 1017, Telp. (0764) 31112 Mataram 83010

## KATA PENGANTAR

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan bidang pertanian adalah terselenggaranya penyuluhan pertanian yang mampu mengembangkan sumberdaya manusia khususnya petani-nelayan dalam mengidentifikasi, menganalisa dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Beratnya tantangan masa depan sebagai konsekuensi adanya pergeseran-pergeseran pola pikir, sudah tentu memerlukan penyempurnaan kebijaksanaan penyuluhan pertanian dari kebijaksanaan yang bertumpu pada menjadikan petani-nelayan yang mampu berproduksi kearah mewujudkan petani-nelayan yang maju, tangguh dan mandiri yang berjiwa agribisnis.

Untuk itu, Balai Informasi Pertanian NTB, menerbitkan brosur Kebijakan Penyuluhan dalam Pelita VI.

Semoga brosur ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya sejawat para penyuluh.

Mataram, Desember 1994

BIP-NTB.

# KATA PENGANTAR

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan bidang pertanian adalah terselenggaranya penyuluhan pertanian yang mampu mengembangkan sumberdaya manusia khususnya petani-nelayan dalam mengidentifikasi masalah dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Berbagai tantangan masa depan sebagai konsekuensi adanya percepatan-pergerakan pola pikir sudah tentu memerlukan penyempurnaan kebijaksanaan penyuluhan pertanian dan kebijaksanaan yang bertumpu pada menjadikan petani-nelayan yang mampu memproduksi secara mandiri yang betawa petani-nelayan yang maju, tangguh dan mandiri yang betawa agribisnis.

Untuk itu, Balai Latihan Pertanian NTT, menantikan proses Kebijaksanaan Penyuluhan dalam Petta VI. Semoga proses ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya sejawal para penyuluh.

## I. PENDAHULUAN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. MANDAT, MISI DAN TUJUAN PENYULUHAN PERTANIAN.....	4
III. KEBIJAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN.....	9

DAFTAR ISI

..... KATA PENGANTAR ..... 1

..... DAFTAR ISI ..... iii

..... I PENDAHULUAN ..... 1

..... II MANDAT, MISI DAN TUJUAN PENYULUHAN ..... 4

..... III PERTANYAAN ..... 4

..... III KEBERHASILAN PENYULUHAN PERTANYAAN ..... 9

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian dalam Pelita VI mempunyai tujuan tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, termasuk didalamnya mengembangkan peranserta dan kemandirian para pelakunya, terutama para petani dan nelayan. Selain itu, upaya-upaya pembangunan pertanian diarahkan untuk mengembangkan industrialisasi pertanian melalui pengembangan agribisnis. Tujuan tersebut hendak diciptakan dalam kerangka strategi pembangunan pertanian yang berintikan penjalinan ciri-ciri produksi pertanian dengan industri sehingga dapat diciptakan keterkaitan kedepan dan kebelakang dalam mata rantai agribisnis, yang pada akhirnya dapat direalisasikan dalam perubahan struktur ekonomi pedesaan. Kerangka yang demikian diwujudkan dalam bentuk sistem produksi pertanian yang berkelanjutan dan semakin efisien, kesempatan kerja di luar pertanian yang semakin bertambah di pedesaan, pembagian

pendapatan antara pertanian dan industri semakin seimbang, dan pendapatan devisa negara semakin bertambah.

Perubahan orientasi pembangunan pertanian seperti itu menghendaki adanya upaya-upaya yang tidak hanya meningkatkan produksi dan produktivitas, melainkan juga upaya-upaya yang mampu menggugah para petani dan nelayan menerapkan konsepsi agribisnis dengan pengelolaan sumberdaya seefisien mungkin. Karena itu, penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus pula mengorientasikan diri sedemikian sehingga mampu berperan dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut.

Uraian berikut ini merupakan arahan umum bagi para pelaksana, penyelenggara dan pembina penyuluhan pertanian di Indonesia. Penerapan arahan ini hendaknya bersifat fleksibel dalam kerangka

mengembangkan perilaku petani dan nelayan sebagai usahawan profesional. Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai aparat yang langsung di bawah Menteri Pertanian dalam membina penyelenggaraan teknis penyuluhan pertanian hendaknya mampu menjabarkan arahan ini ke dalam berbagai pedoman bagi para penyelenggara/pelaksana kegiatan penyuluhan pertanian.

## II. MANDAT, MISI DAN TUJUAN PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam kedudukannya yang sangat strategis untuk mensukseskan pembangunan pertanian, penyuluhan pertanian mempunyai mandat menyelenggarakan pendidikan luar sekolah (non formal) bagi petani dan nelayan beserta anggota keluarganya serta anggota masyarakat lainnya, terutama di pedesaan. Ciri khas pendidikan luar sekolah ini adalah (1) tidak ada paksaan untuk belajar, (2) isi pendidikan didasarkan atas kebutuhan petani dan nelayan, dan (3) dilaksanakan atas dasar partisipasi penuh petani dan nelayan. Mandat ini berlaku untuk semua kategori petani dan nelayan, baik yang berskala usaha kecil, menengah, maupun besar; baik petani dan nelayan dewasa, wanita tani dan nelayan, maupun pemuda tani dan nelayan. Berbagai kategori ini mempunyai peranan dan kedudukan serta kegiatan yang berbeda sehingga memerlukan alokasi

sumberdaya penyuluhan yang sepadan (kualifikasi penyuluh, metode, materi, tujuan dan dukungan) yang disertai dengan program penyuluhan yang mampu mengembangkan sumberdaya manusia dan alih teknologi sesuai dengan keadaan /kategorinya. Kualifikasi penyuluhpun berbeda untuk berbagai kategori itu. Kelompok pemuda/taruna maupun wanita memerlukan perhatian yang lebih khusus sehubungan dengan kedudukan dan peranan mereka dalam rumah tangga, masyarakat, dan pembangunan pertanian di masa depan.

Dalam kerangka mandatnya tersebut, penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan membawa dua misi pokok, yaitu (1) pengembangan sumberdaya manusia dan (2) alih teknologi. Kedua misi pokok ini merupakan peranan-peranan yang perlu dijalankan oleh penyuluhan pertanian untuk membawa kemajuan sektor pertanian. Pengembangan sumberdaya manusia berinti pada

pengembangan perilaku dan kemampuan serta pendayagunaan kemampuan-kemampuan yang telah berkembang ke dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, kesehatan lingkungan, serta kelangsungan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Pendayagunaan kemampuan yang telah berkembang dilakukan melalui penciptaan iklim yang mampu memperluas rentang pilihan usaha petani dan nelayan, yaitu antara lain melalui penyediaan pilihan teknologi, pasar, harga, pendapatan dan lapangan kerja. Penyuluh pertanian dalam alih teknologi berperan membantu petani dan nelayan menentukan pilihan atas teknologi yang akan digunakan dengan jalan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas akibat penggunaan sesuatu teknologi, seperti im-bangan biaya dan pendapatan, risiko, pasar dan saluran pemasaran, kualitas produksi, dan kualitas produk yang diperlukan pembeli.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada dasarnya mempunyai tujuan langsung atau "output" yang berbeda pada berbagai tingkat daerah (lapangan/kecamatan/Dati II, Dati I, Pusat) maupun untuk berbagai tingkat kategori petani dan nelayan. Meskipun mempunyai "output" yang berbeda, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan menuju kepada suatu fokus, yaitu menolong petani dan nelayan mengidentifikasi menganalisa dan memecahkan berbagai masalah yang menyangkut usahanya sebagai bagian dari sistem agribisnis sehingga menghasilkan perilaku profesional dalam bentuk antara lain :

1. perilaku usahawan yang rasional dalam mengambil keputusan usaha yang didasarkan atas permintaan pasar dan saluran pemasaran yang tepat;
2. pengelolaan usaha yang efisien disertai kemampuan bekerjasama diantara sesama petani maupun antara petani dengan pengusaha agro-industri dan sektor ekonomi pedesaan lainnya;

3. kepemimpinan yang berkembang secara mandiri ke arah berkembangnya sistem pengguna aktif berbagai kesempatan dan informasi usaha yang tersedia;
4. usaha yang berorientasi pelestarian sumberdaya alam sehingga dapat mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
5. penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif cepat melalui kemandirian dalam mencari, menganalisa dan mengambil keputusan atas informasi yang tersedia;
6. ketahanan pangan di tingkat keluarga, masyarakat lingkungan, dan tingkat nasional.

### III. KEBIJAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam PJP II, khususnya PELITA VI, penyelenggaraan penyuluhan pertanian menghadapi berbagai tantangan berupa lingkungan sosial ekonomi nasional maupun global yang dinamis, antara lain dalam bentuk (1) orientasi pembangunan pertanian kearah penerapan pendekatan agribisnis; (2) peningkatan peranan dan peran serta masyarakat, dalam hal ini petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya; dan (3) pelaksanaan desentralisasi yang mengarah kepada pelaksanaan otonomi daerah tingkat II yang lebih luas dan lebih bertanggung jawab. Tantangan tersebut memerlukan perubahan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yaitu dari kebijaksanaan yang bertumpu pada menjadikan petani dan nelayan hanya terampil berproduksi menjadi kebijaksanaan yang dapat menciptakan iklim motivasi petani dan nelayan untuk lebih rasional

dan efisien dalam mengembangkan usaha berdasarkan kemampuan wilayah, kemampuan identifikasi, analisis, dan pemecahan masalah serta kemampuan memperoleh informasi dan mengenali potensi pasar bagi hasil usahanya.

Dalam PÉLITA VI, penyelenggaraan penyuluhan pertanian diarahkan untuk :

1. Memberikan dorongan bagi berkembangnya kelembagaan tani dan nelayan kearah terciptanya sistem pengguna aktif dari informasi dan berbagai kesempatan berusaha yang muncul sebagai akibat perubahan lingkungan sosial ekonomi yang yang dinamis. Pengambilan keputusan oleh petani dan nelayan secara mandiri melalui perencanaan wilayah yang partisipatif perlu dikembangkan secara bertahap. Secara bertahap pula, para petani dan nelayan diarahkan untuk mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

melalui kunjungan para petani dan nelayan secara berkala ke BPP.

2. Memperkuat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan personil, sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai dalam menghadapi arah perkembangan perilaku petani dan nelayan sebagai sistem pengguna aktif berbagai informasi dan kesempatan berusaha. BPP diarahkan untuk menjadi pusat pengelolaan penyuluhan pertanian di pedesaan yang mampu melayani seluruh kepentingan pendidikan non formal bagi petani dan nelayan beserta keluarganya serta masyarakat pedesaan pada umumnya.
3. Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan penyuluhan pertanian yang mampu mendukung pengembangan kelembagaan petani dan nelayan serta mampu menciptakan iklim kepemimpinan demokratis dalam mengembangkan agribisnis. Perangkat terdempannya adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Jaringan kelembagaan ini tidak saja berfungsi me-

nyalurkan berbagai informasi mengenai teknologi produksi, melainkan juga menyalurkan informasi pasar dan pemasaran (harga, standar, pangsa pasar komoditi) serta berbagai kesempatan berusaha yang terbuka di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Arah yang demikian perlu ditempuh mengingat bahwa perilaku usahawan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pengembangan agribisnis. Selain itu, keberhasilan mengkaitkan sistem produksi pertanian kepada mata rantai agribisnis sangat ditentukan oleh keberhasilan upaya-upaya memberikan motivasi kepada kelompok tani untuk berkembang menjadi kelompok-kelompok usaha atau asosiasi sesuatu komoditas /kombinasi komoditas pertanian. Perkembangan ini hanya dimungkinkan oleh adanya kesempatan berusaha yang lebih luas yang dapat diciptakan melalui pembangunan jaringan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berkarakter profesional.

4. Mengorientasikan para petugas lingkup pertanian (penyuluh dan aparat pembinanya) agar mereka memiliki satu kesatuan tindakan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Para penyuluh pertanian hendaknya dikembangkan kemampuannya sesuai dengan perubahan orientasi penyuluhan pertanian, terutama yang menyangkut kemampuan bekerjasama dengan petani dan peneliti dalam merancang pengembangan wilayah kerja. Penyuluh, petani dan peneliti hendaknya menjalin kerjasama dalam mengidentifikasi kemampuan wilayah serta kemampuan sosial ekonomi petani dan nelayan sehingga dapat diciptakan suasana pengambilan keputusan pengembangan usaha petani dan nelayan secara partisipatif atas dasar efisiensi usaha dan informasi pasar. Dengan demikian penyuluh pertanian yang sehari-harinya berinteraksi dengan para petani dan nelayan hendaknya berpangkal kerja di BPP.
5. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian terutama diletakkan pada Daerah Tk. II dengan materi yang se-

- suai dengan mandat, misi, tujuan penyuluhan pertanian dan kondisi/ potensi riil daerah serta berkaitan dengan berbagai program prioritas pembangunan pertanian.
6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Tingkat Propinsi maupun secara Nasional diarahkan untuk mampu mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Daerah Tk. II dan BPP. Dukungan ini terutama dalam bentuk penciptaan iklim berupa kebijaksanaan, pedoman yang didasarkan atas monitoring, evaluasi, studi dan menghubungkan wilayah otonomi Dati II dengan kesempatan usaha yang tersedia di tingkat Propinsi, Nasional, dan Internasional.
  7. Penggunaan berbagai pendekatan dan metode penyuluhan pertanian disesuaikan dengan perkembangan ataupingkat kemajuan sosial ekonomi wilayah dan tujuan yang hendak dicapai dalam wilayah yang bersangkutan. Pendekatan "participatory" dan "cost-

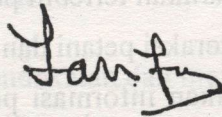
"sharing" dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian merupakan pendekatan yang cocok diterapkan guna mengembangkan peranserta dan kemandirian petani dan nelayan dalam pembangunan pertanian. Mengingat keragaman kondisi sosial ekonomi petani dan nelayan, pendekatan lainnya dapat digunakan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

8. Mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian didasarkan atas prinsip keterlibatan semua unsur penyuluhan pertanian sebagai suatu jaringan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tidak saja berfungsi sebagai penyalur informasi teknologi produksi, melainkan terlebih penting dari itu adalah pendukung interaksi petani dan nelayan dengan penyuluh dan berintikan informasi pertanian yang dibutuhkan petani dan nelayan (pasar, harga, kualitas, standar, teknologi, ilmu pengetahuan, kredit, perbankan, dan lain-lain kesempatan usaha). Mekanisme dan tata hubungan kerja ini tidak saja menyangkut para

petugas pemerintah yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian, namun juga melibatkan sektor ekonomi swasta, BUMN, dan lembaga sosial dan ekonomi pedesaan lainnya. Dengan demikian pengembangan jaringan kelembagaan penyuluhan pertanian akan dapat merupakan jaringan yang utuh dalam melayani kepentingan peserta didik, kepentingan pemerintah dan kepentingan sektor ekonomi swasta/BUMN, maupun kepentingan nasional.

Jakarta, 21 Oktober 1994

Menteri Pertanian Republik Indonesia



Prof. Dr. Ir. Sjarifuddin Baharsjah.

Catatan :



Set : Umum

Nomor : 01/W/1994/1992

Qplang : 2.500 expl.

Produksi : BP - NTB

Kotak Pos 1017 Telp. 31312 Muntir 83010

Dang : APBD TK/NTB Tahun 1994/1992

TIDAK DIPERDAGANGKAN



Seri : Umum

Nomor : 01/B/1994/1995

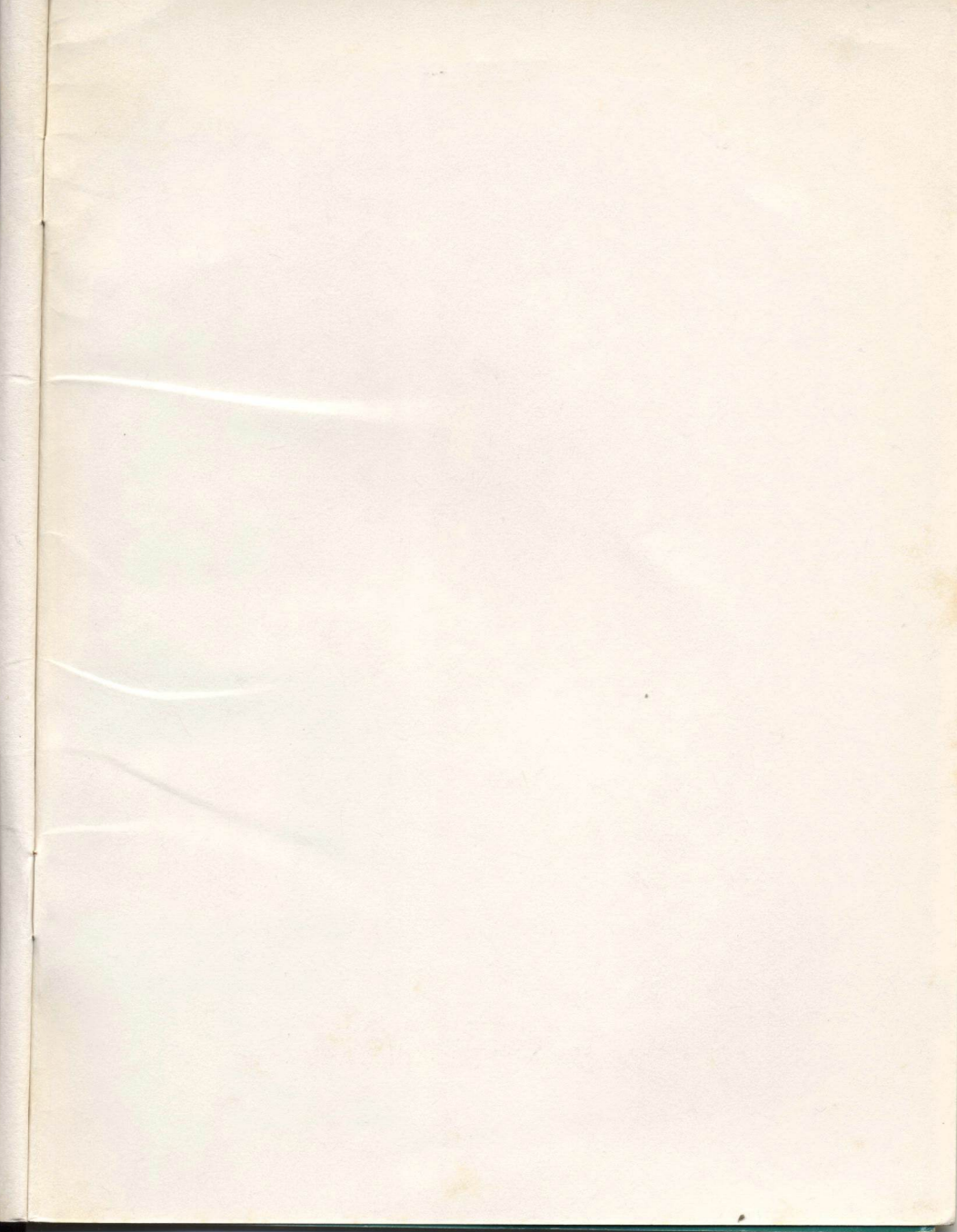
Oplaaq : 2.500 expl.

Produksi : BIP - NTB

Kotak Pos 1017 Telp. 31312 Mataram 83010.

Dana : APBD Tk.I NTB Tahun 1994/1995

**TIDAK DIPERDAGANGKAN**





374  
PE

TIDAK DIPERDAGANGKAN